

JURNAL

**PERANAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP
PEREKONOMIAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI
SULAWESI UTARA**

AYU AZHARI AMIN

110314045

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Ir. Grace A.J. Rumagit, MSi**
- 2. Dr. Ir. Theodora M. Katiandagho, MSi**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
MANADO**

2015

ABSTRAK

Ayu Azhari Amin. Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara (dibawah bimbingan Grace A.J. Rumagit sebagai Ketua, dan Theodora M. Katiandagho sebagai Anggota).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan Februari 2015 hingga April 2015 di Provinsi Sulawesi Utara, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Analisis ini menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Multiplier Share* (MS), dan Elastisitas tenaga kerja, dengan menggunakan variable PDRB dan jumlah tenaga kerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara relatif stabil dari tahun ke tahun, dan ditinjau dari PDRB sektor industri pengolahan termasuk sektor non basis, untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk PDRB selain tenaga kerja, yang bisa meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan. Sedangkan, peran sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong kecil dan cenderung stabil setiap tahunnya, dilihat dari aspek tenaga kerja, sektor industri pengolahan termasuk sektor basis.

Kata Kunci : Sektor Industri Pengolahan, Location Quotient, Multiplier Share, Elastisitas Tenaga Kerja

ABSTRACT

Ayu Azhari Amin. **Role of Manufacturing Sector on the Economy and Labor Absorption in North Sulawesi** (under the guidance of Grace A.J. Rumagit as chairman, and Theodora M. Katiandagho as a member).

This study aimed to analyze the role of the manufacturing sector to the economy and employment in the province of North Sulawesi.

This research was conducted for three months from February 2015 to April 2015 in the province of North Sulawesi, the data used in this research is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics North Sulawesi.

This analysis using Location Quotient (LQ), Multiplier Share (MS), and the elasticity of labor, using variabe GDP and total employment.

These results indicate that the role of the manufacturing sector to the economy in North Sulawesi are relatively stable from year to year, and in terms of the manufacturing sector GDP including the non bases. For that, we need further research to determine the factors forming GDP besides labor, which could boost the manufacturing sector GDP. Meanwhile, the role of the manufacturing sector on employment in the province of North Sulawesi is still relatively small and tend to be stable each year. Seen from the aspect of employment, including the processing industry sector basis.

Keyword : Processing Industry Sector, Location Quotient, Multiplier Share, Elasticity Of Labor

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif adanya pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-

negara berkembang termasuk Indonesia adalah sektor industri pengolahan berbasis pertanian. Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (the leading sector) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya (Saragih, 2010).

Sebagai negara agraris yang bertumpu pada sektor pertanian, maka prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor industri pengolahan yang utama adalah untuk menopang sektor pertanian (agroindustri) dan sektor-sektor lainnya. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer (pertanian), meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan pangsa sektor tersier (jasa) dimana kontribusi sektor industri meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1998).

Laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulampua hingga tahun 2013 terus menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan dinamis. Perlambatan ekonomi global yang diikuti perlambatan ekonomi di Indonesia, terbukti kurang berdampak kepada kondisi ekonomi Wilayah Sulampua. Provinsi Sulawesi Utara memberikan kontribusi sebesar 12,1 % terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulampua.

Salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan perekonomian adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dicerminkan dalam angka Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara didorong karena adanya kontribusi dari tujuh sektor unggulan diantaranya sektor industri pengolahan. Pada Tabel 1, PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Pada tahun 2013 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1.693.277 juta mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.626.095 juta pada tahun 2012.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2009	2010	2011	2012*	2013**
1	Pertanian	3.311,00	3.592,00	3.551,00	3.768,00	3.923,00
2	Pertambangan & Penggalian	899,00	927,00	992,00	1.054,00	1.107,00
3	Industri Pengolahan	1.329,00	1.459,00	1.547,00	1.626,00	1.693,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	137,00	145,00	153,00	166,00	191,00
5	Konstruksi	2.766,00	2.808,00	3.142,00	3.460,00	3.636,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.754,00	3.026,00	3.453,00	3.756,00	4.211,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.229,00	2.429,00	2.580,00	2.753,00	2.941,00
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	1.128,00	1.223,00	1.329,00	1.462,00	1.689,00
9	Jasa-jasa	2.597,00	2.768,00	2.990,00	3.242,00	3.481,00
Produk Domestik Regional Bruto		17.117,00	18.343,00	19.699,00	21.242,00	22.828,00

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun, dalam hal penyerapan tenaga kerja atau penyediaan lapangan kerja sektor

industri pengolahan masih belum memberikan kontribusi yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan, yaitu hanya sebesar 5 %, dibandingkan dengan delapan sektor lainnya (BPS Sulut, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2013 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1.693.277 juta mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.626.095 juta pada tahun 2012.

Namun, dalam hal penyerapan tenaga kerja atau penyediaan lapangan kerja sektor industri pengolahan masih belum memberikan kontribusi yang cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan, yaitu hanya sebesar 5 %, dibandingkan dengan delapan sektor lainnya (BPS Sulut, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sektor industri pengolahan terhadap

perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun manfaat penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang peranan sektor industri pengolahan, sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya dan akademisi, dan sebagai sumber informasi kepada para pengambil keputusan yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal penentuan kebijakan pembangunan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Perekonomian Suatu Wilayah

Perekonomian suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di dalam suatu wilayah dimana kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut terbagi dalam beberapa sektor dan sub-sektor serta dapat menghasilkan input dan output dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Perekonomian wilayah secara umum dapat dianalisis pada dua aspek yaitu, analisis aspek sektoral dan analisis aspek regional. Kajian tersebut dapat dilakukan untuk tingkat ekonomi nasional, maupun untuk tingkat ekonomi daerah (*local*).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah

dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2006). Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat digambarkan dengan adanya perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2010).

Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (2009), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi. (Tarigan, 2007). Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi, yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008).

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi wilayah, menurut pandangan para ahli sebagai berikut:

Tabel 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

No.	Pandangan Ahli	Konsep Pertumbuhan Ekonomi
1.	Adam Smith ^{***} (Teori Ekonomi Klasik)	Sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi <i>full employment</i> dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state).
2.	Harrod-Domar ^{**} (Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional)	Bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan (tingkat pertumbuhan modal dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja).
3.	Solow-Swan ^{***} (Teori Pertumbuhan Neo-Klasik)	Bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebijakan fiskal dan moneter.
4.	Samuelson [*] (Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan)	Setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki <i>competitive advantage</i> untuk dikembangkan. Perkembangan struktur tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor sektor saling terkait dan saling mendukung sehingga pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.
5.	Tiebout ^{***} (Teori Basis Ekspor)	Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat <i>exogenous</i> artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (<i>Multiplier Effect</i>) terhadap perekonomian daerah/wilayah. Sedangkan kegiatan non basis adalah

Tabel 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (lanjutan)

No.	Pandangan Ahli	Konsep Pertumbuhan Ekonomi
		memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.
6.	Model Pertumbuhan Interregional***	Model pertumbuhan interregional adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

(Sumber : * = Adisasmita, 2008; ** = Sirojuzilam, 2008; dan *** = Tarigan 2007).

Tabel 2 menunjukkan bahwa teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Solow-Swan, dan teori jalur cepat (*Turnpike*) merupakan teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional yang berkaitan dengan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Sedangkan, teori basis-ekspor dan model interregional merupakan teori yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi wilayah .

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Informasi hasil pembangunan yang didapatkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. PDRB merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya dibidang ekonomi salah satu alat yang dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Pendapatan regional didefinisikan sebagai tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah, dimana tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total

pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tersebut (Tarigan, 2007).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga bulan atau semesteran. Sedangkan, nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (BPS, 2014).

Manfaat dari data PDRB adalah sebagai berikut (BPS, 2014) :

- 1) Mengetahui atau menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu wilayah.
- 2) Membandingkan perekonomian suatu wilayah dari waktu ke waktu.
- 3) Membandingkan perekonomian antar wilayah.
- 4) Merumuskan kebijaksanaan pemerintah.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun

dasar maupun triwulan, sebagai berikut dijelaskan (BPS, 2014) :

- 1) Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
- 2) Penyajian atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam hal ini dipakai harga konstan didasarkan harga pada tahun 2000). Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku ada dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode tidak langsung adalah perhitungan dengan mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah penduduk, luas areal sebagai alokatornya (Tarigan, 2007).

Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan (Tarigan, 2007), yaitu :

- 1) Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diprediksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, misalnya pertanian, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dan nilai biaya antara (*intermediate cost*), yaitu bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi.
- 2) Pendekatan Pendapatan
Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.
- 3) Pendekatan Pengeluaran
Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah

tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Analisis Perekonomian Wilayah

Terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah. Alat analisis itu antara lain (Tarigan, 2007) :

Location Quotient

Location quotient adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Berikut ini yang digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya adalah sebagai berikut (Tarigan, 2007) :

$$LQ = \frac{xi/PDRB}{Xi/PNB} \text{-----} \quad (2.1)$$

Keterangan :

- xi = Nilai tambah sektor i di suatu daerah
- PDRB = Produk domestik regional bruto di daerah tersebut
- Xi = Nilai tambah sektor i secara nasional
- PDB = Produk domestik bruto atau GNP

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka ada tiga kriteria penilaian LQ yang diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 2004), yaitu :

- a. Apabila $LQ = 1$ artinya peranan suatu sektor di wilayah analisis sama dengan peranannya di tingkat nasional.
- b. Apabila $LQ > 1$ artinya peranan suatu sektor di wilayah analisis lebih besar dibandingkan dengan peranannya di tingkat nasional.
- c. Apabila $LQ < 1$ artinya peranan suatu sektor di wilayah analisis lebih kecil dibandingkan dengan peranannya di tingkat nasional.

Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ riil daerah tersebut. Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang sangat sederhana, akan tetapi analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk *time-series/trend*, artinya dianalisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal itu dapat membantu untuk melihat kekuatan / kelemahan wilayah analisis (Tarigan, 2007).

Multiplier Basis Ekonomi

Multiplier basis ekonomi digunakan secara luas dalam proyeksi. Dengan mengevaluasi prospek masa datang dari kegiatan-kegiatan basis dalam perekonomian wilayah, dan menetapkan *multiplier* tenaga kerja (*Employment Multiplier*) yang diperoleh dari rasio total kesempatan masa

datang dapat diperkirakan. Selain *multiplier* tenaga kerja dapat pula dihitung, *multiplier* pendapatan yang menunjukkan proyeksi pendapatan di masa yang akan datang baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang.

Pengertian Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri dianggap sebagai *the leading sektor* yang mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor yang lain, seperti sektor jasa dan pertanian (Arsyad, 2010). Struktur perekonomian suatu wilayah yang relatif maju ditandai oleh semakin besarnya peran sektor industri pengolahan dan jasa dalam menopang perekonomian wilayah tersebut. Sektor ini telah menggantikan peran sektor tradisional (pertanian) dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan wilayah (Sahara dan Resusodarmo, 1994).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makanan dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Klasifikasi lapangan usaha telah dibuat oleh Badan Pusat Statistik tahun 1983 dan telah diublikasikan dengan judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI dibuat oleh Badan Pusat Statistik bersama instansi-instansi yang berkaitan berdasarkan (ISIC) International Standard Industrial Classification (Barthos, 2004). Menurut BPS, Sektor Industri Pengolahan Non Migas Sulawesi Utara mencakup beberapa sub sektor, yaitu :

Tabel 3. Sub Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Kode	Jenis Industri
10	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
11	Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki
12	Industri Barang dari Kayu dan Hasil Hutan lainnya
16	Industri Kertas dan Barang Cetak
18	Industri Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet
13	Industri Semen dan Barang Galian bukan Logam
20	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
23	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya
24	Industri Barang Lainnya

Sumber : BPS Sulut, 2014

Peranan sektor industri dalam menciptakan produksi nasional dan menampung tenaga kerja telah dapat dilihat bahwa peranannya meningkat. Dalam sektor industri itu sendiri peranan sub sektor industri pengolahan pada umumnya mengalami kenaikan pula dalam menghasilkan produksi sektor industri dan menyediakan kesempatan kerja (Sukirno, 2006).

Konsep Tenaga Kerja

Salah satu indikator yang terpenting di dalam menilai perkembangan ekonomi adalah struktur tenaga kerja menurut sektor. Keseimbangan antara tenaga kerja di sektor-sektor produksi materiil (pertanian, pertambangan,

industri dan bangunan) dengan sektor-sektor jasa sangat menentukan perkembangan ekonomi (Barthos, 2004).

Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri dari dua kata yaitu tenaga dan kerja. Tenaga adalah banyaknya usaha yang dikeluarkan dalam tiap satuan waktu. Sedangkan kerja adalah banyaknya tenaga yang dikeluarkan dalam satu kurun waktu untuk menghasilkan suatu jumlah efek. Dengan demikian tenaga kerja adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (Suroto, 1992).

Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Tunggal, 2013).

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu industri karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan industri dipengaruhi oleh tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini tenaga kerja dalam pengembangan usaha harus diperhatikan dan diperhitungkan ketersediaannya baik kuantitas maupun keterampilan kerja (Assauri, 1999).

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia

kerja setiap negara berbeda-beda. Usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah dianggap mampu melaksanakan pekerjaan, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kelompok lainnya seperti pensiunan (Disnaker, 2008).

Menurut UU No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

. Klasifikasi Tenaga Kerja

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja di Indonesia dibedakan menurut umur. Di Indonesia berdasarkan pengertian sensus penduduk dipilih batas-batas umur minimum 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun. Dengan demikian tenaga kerja yang dimaksud adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sampai dengan 64 tahun. Penduduk yang berada dibawah 15 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.



Sumber : Simanjuntak, 1998

Gambar 1. Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPS Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan data sekunder dimana pengumpulan data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari - April 2015.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, antara lain :

1. PDRB Provinsi Sulawesi Utara dan PDRB Wilayah Sulampua periode 2009-2013, data ini digunakan untuk analisis pertumbuhan sektor industri pengolahan dan analisis sektor basis dan sektor non basis. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.
2. Jumlah tenaga kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2013 (dinyatakan dalam jiwa), data ini digunakan untuk analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.
3. Data sekunder lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Konsep Pengukuran Variabel

1. PDRB Seluruh Sektor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009-2013 Atas dasar Harga Konstan.
2. PDRB Seluruh Sektor Wilayah Sulampua tahun 2009 – 2013 Atas dasar Harga Konstan.
3. PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009-2013 Atas dasar Harga Konstan.
4. PDRB Industri Pengolahan Wilayah Sulampua tahun 2009 – 2013 Atas dasar Harga Konstan.
5. Jumlah Tenaga Kerja Seluruh Sektor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009-2013.
6. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009-2013.

Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu :

Metode *Location Quotient*

Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor industri pengolahan dari PDRB Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi/basis kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong

tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode sebagai berikut :

$$LQ = \frac{x_i/PDRB}{X_i/PDB} \text{-----} (3.1)$$

Keterangan :

- x_i = PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara
- PDRB = PDRB seluruh sektor Provinsi Sulawesi Utara
- X_i = PDRB sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua
- PDRB = PDRB seluruh sektor Wilayah Sulampua

(Sumber : Tarigan, 2007)

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka ada tiga kriteria penilaian LQ yang dipeoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 2004), yaitu :

- a. Apabila $LQ = 1$ artinya peranan suatu sektor di Provinsi Sulawesi Utara sama dengan peranannya di Wilayah Sulampua.
- b. Apabila $LQ > 1$ artinya peranan suatu sektor di Provinsi Sulawesi Utara lebih besar dibandingkan dengan peranannya di Wilayah Sulampua.
- c. Apabila $LQ < 1$ artinya peranan suatu sektor di Provinsi Sulawesi Utara lebih kecil

dibandingkan dengan peranannya di Wilayah Sulampua.

Multiplier Basis Ekonomi

Multiplier basis ekonomi digunakan secara luas dalam proyeksi. Dengan mengevaluasi prospek masa datang dari kegiatan-kegiatan basis dalam perekonomian wilayah, dan menetapkan multiplier tenaga kerja (*Employment Multiplier*) yang diperoleh dari rasio total kesempatan masa datang dapat diperkirakan. Selain multiplier tenaga kerja dapat pula dihitung, multiplier pendapatan yang menunjukkan proyeksi pendapatan di masa yang akan datang baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. *Multiplier Shorrun* (*Multiplier* jangka pendek), sebagai berikut :

$$MS = \frac{1}{1 - \frac{NB}{NB+B}} \text{-----} (3.2)$$

Keterangan :

- MS = *Multiplier Shorrun* (*Multiplier* jangka pendek)
- NB = PDRB / Tenaga Kerja Sektor Non Basis
- B = PDRB / Tenaga Kerja Sektor Basis

Elastisitas Tenaga Kerja

Untuk menganalisis peranan sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Maka dapat dihitung laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan dan pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan di Provinsi

Sulawesi Utara dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arsyad, 2010) :

$$gl = \frac{l_t - l_{t-1}}{l_{t-1}} \times 100\% \text{ ----- (3.3)}$$

Keterangan :

- gl = Pertumbuhan tenaga kerja
- l_t = Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun hitung
- l_{t-1} = Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun sebelumnya

$$gY = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \text{ ----- (3.4)}$$

Keterangan :

- gY = Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
- Y_t = Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun hitung
- Y_{t-1} = Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun sebelumnya

$$E = \frac{\% \Delta TK_i}{\% \Delta PDRB_i} \text{ ----- (3.5)}$$

Keterangan :

- E = Elastisitas Tenaga Kerja
- ΔTK_i = Perubahan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan
- $\Delta PDRB_i$ = Perubahan PDRB sektor industri pengolahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari sudut geografis berada pada posisi 00°15' – 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07 – 127°10 Bujur Timur.

- Sebelah Utara : Republik Philipina
- Sebelah Timur : Laut Maluku
- Sebelah Barat : Provinsi Gorontalo
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya wilayah daratan mempunyai luas 14.544,36 km². Secara administrasi Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota, yaitu :

Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2013 berjumlah 2.343.527 jiwa. Dengan luas wilayah 14.544,36 km², berarti kepadatan penduduknya mencapai 161.13 jiwa/km² (Tabel 4).

Data penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Manado, yaitu sebesar 419.596 jiwa dengan luas wilayah 166,87 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 2.514,51 jiwa/km². Jumlah penduduk terkecil berada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk 59.908 jiwa dengan luas wilayah 1.798,29 km² dengan kepadatan penduduk 33,31 jiwa/km². Hal itu dapat dilihat pada Tabel 4.

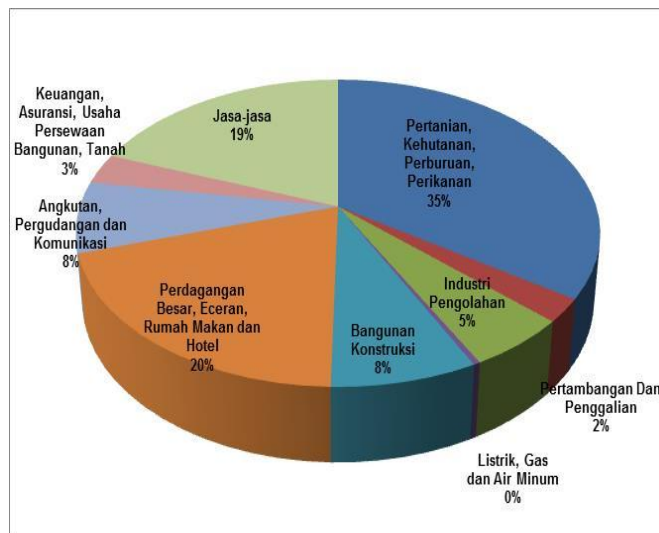
Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara 2013

Kabupaten / Kota	Penduduk (Jiwa)	Luas Area (Km ²)	Kepadatan/km ²
Bolaang Mongondow	224.400	3.021,60	74,26
Minahasa	319.945	1.188,69	269,16
Kepulauan Sangihe	129.008	597,13	216,05
Kepulauan Talaud	85.984	1.014,74	84,74
Minahasa Selatan	200.072	1.478,47	135,32
Minahasa Utara	196.842	985,24	199,79
Bolaang Mongondow Utara	71.570	1.935,53	36,98
Kepulauan Sitaro	64.744	218,18	296,75
Minahasa Tenggara	102.226	709,28	144,13
Bolaang Mongondow Selatan	59.908	1.798,29	33,31
Bolaang Mongondow Timur	66.677	904,16	73,74
Manado	419.596	166,87	2.514,51
Bitung	198.257	330,17	600,47
Tomohon	95.157	147,11	646,84
Kotamobagu	109.141	48,91	2.231,47
Jumlah	2.343.527	14.544,36	161,13

Sumber : BPS Sulawesi Utara

Pada tahun 2013, penduduk usia kerja di Sulawesi Utara yang masuk angkatan kerja berjumlah 1.035.772 jiwa dan dari angkatan kerja yang ada, tercatat 965.457 jiwa yang sedang bekerja. Sementara yang termasuk bukan angkatan kerja berjumlah 707.747 jiwa dan dari bukan angkatan kerja yang ada tercatat 164.963 jiwa yang bersekolah dan 428.991 jiwa mengurus rumah tangga.

Jika dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja per sektor, terlihat bahwa pada tahun 2013 sektor pertanian menyerap sebagian besar jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 333.103 jiwa atau sebesar 35 %, sektor perdagangan 20 %, sektor jasa 19 %, sektor angkutan perdagangan dan komunikasi dan sektor bangunan konstruksi 8 %, dan sektor industri pengolahan 5 % . Sedangkan sektor lainnya, yaitu sektor keuangan, sektor pertambangan, dan sektor listrik gas dan air bersih, menyerap tenaga kerja kurang dari 5 %.



Sumber : BPS Sulawesi Utara, diolah dari lampiran 5

Gambar 2. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dari perekonomian secara komprehensif dan terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu, sehingga menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro, 2000). Alat ukur untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator makro ekonomi, dapat menggambarkan situasi dan kondisi perekonomian di suatu daerah termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan kegiatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, dapat di lihat pada (Tabel 5).

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	2,07	8,50	-1,14	6,10	4,12
2. Pertambangan dan penggalian	5,50	3,16	6,93	6,29	5,06
3. Industri Pengolahan	7,02	9,81	5,98	5,14	4,13
4. Listrik, gas, dan air bersih	14,88	5,83	5,02	8,85	14,78
5. Bangunan	6,10	1,51	11,90	10,11	5,08
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	12,31	9,87	14,12	8,78	12,11
7. Pengangkutan dan komunikasi	16,89	8,96	6,24	6,69	6,84
8. Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan	7,57	8,38	8,67	10,07	15,48
9. Jasa-jasa	6,85	6,58	8,02	8,42	7,39
Pertumbuhan Ekonomi	7,85	7,16	7,39	7,86	7,45

Sumber : BPS Sulawesi Utara

Selang tahun 2009 – 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara atas dasar harga konstan berada pada kisaran 7,16 % hingga 7,86 % dengan rata-rata pertumbuhan 7,5 % per tahun. Pada sektor industri pengolahan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 9,81 %, sedangkan terendah pada tahun 2013 sebesar 4,13 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi khususnya untuk sektor industri pengolahan adalah 6,4 % per tahun. Sektor lain yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi di Sulawesi Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, dan sektor , listrik, gas dan air bersih dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor 11,4 % (sektor perdagangan, hotel, dan restoran), 10 % (sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan), dan 9,8 % (sektor , listrik, gas dan air bersih). Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah sektor pertanian dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,93 % per tahun. Hal ini disebabkan karena

semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, yang berdampak pada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Sektor lainnya yang memiliki pertumbuhan yang tergolong kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhan 5,38 % per tahun.

Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2009 hingga tahun 2013 dapat di lihat pada (Tabel 6).

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	17.117,00	7,85
2010	18.343,00	7,16
2011	19.699,00	7,39
2012	21.242,00	7,86
2013	22.828,00	7,45

Sumber : BPS Sulawesi Utara, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan produk Doestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan cenderung stabil setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54 % per tahun, dari jumlah 17.117 milyar rupiah pada tahun 2009 hingga mencapai 22.828 milyar rupiah pada tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukkan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi pula, akan menyebabkan tidak terjadinya peningkatan pendapatan perkapita.

Tabel 7. PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB Perkapita (rupiah)
2009	17.117.000	2.228.856	7.679.724
2010	18.343.000	2.270.596	8.078.495
2011	19.699.000	2.296.666	8.577.215
2012	21.242.000	2.319.916	9.156.366
2013	22.828.000	2.343.527	9.740.873

Sumber : Diolah dari lampiran 1

Tabel 7. Menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang cukup rendah. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan PDRB perkapita setiap tahun namun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan harga kebutuhan pokok yang naik setiap tahunnya. Hingga tahun 2013 PDR perkapita masyarakat Sulawesi Utara berada pada angka 9 juta lebih, atau dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per bulan setiap orang di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 800.000. Sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB perkapita berada pada kisaran atau dengan rata-rata PDRB Perkapita Rp. 8.646.535.

Keadaan Sektor Industri Pengolahan

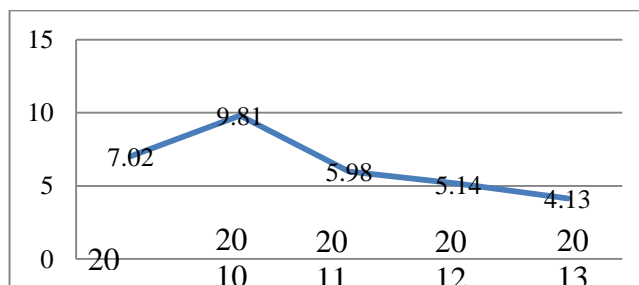
Sektor industri pengolahan merupakan salah satu pekerjaan utama penduduk di Sulawesi Utara, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tercatat PDRB sektor industri pengolahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2009	1.329,00	7,02
2010	1.459,00	9,81
2011	1.547,00	5,98
2012	1.626,00	5,14
2013	1.693,00	4,13

Sumber : BPS Sulawesi Utara, diolah dari lampiran 2 & 4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya infrastruktur ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu atau merupakan jumlah nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan nilai PDRB yang cenderung meningkat setiap tahunnya, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor sekunder yang memberikan kontribusi terhadap PDRB di Sulawesi Utara. Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama tiga tahun terakhir tumbuh lambat atau mengalami penurunan (Gambar 3).



Sumber : BPS Sulawesi Utara, diolah dari lampiran 2 & 4

Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Gambar di atas menunjukkan, pada tahun 2010 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,81 % dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,02 %, kemudian selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2011 sektor industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 5,98 %, kemudian pada tahun 2012 menurun sebesar 5,14 %, dan terakhir pada tahun 2013 sektor industri pengolahan mengalami penurunan hingga 4,13 %. Hal tersebut disebabkan pada menurunnya jumlah produksi pada sub sektor industri pengolahan yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan nilai PDRB di sektor ini.

Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Pada Tabel 9 menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua terhadap pembentukan PDRB Wilayah Sulampua.

Tabel 9. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua Terhadap Pembentukan PDRB Wilayah Sulampua

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua (Milyar Rupiah)	Total PDRB Wilayah Sulampua (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	11.913,00	133.381,00	8,93
2010	12.821,00	141.668,00	9,05
2011	13.765,00	150.114,00	9,17
2012	14.701,00	161.390,00	9,11
2013	15.676,00	175.432,00	8,94

Sumber : Diolah dari lampiran 3 & 4

Di tingkat Wilayah Sulampua, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,04 % terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terendah, berada pada tahun 2009 dan

2013 sebesar 8,93 %. Hal tersebut disebabkan Dan kontribusi sektor industri pengolahan tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,17%.

Tabel 10. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pembentukan PDRB Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara (Milyar Rupiah)	PDRB Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	1.329,00	11.913,00	11,16
2010	1.459,00	12.821,00	11,38
2011	1.547,00	13.765,00	11,24
2012	1.626,00	14.701,00	11,06
2013	1.693,00	15.676,00	10,80

Sumber : Diolah dari lampiran 2 & 3

Tabel 10 menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan Sulawesi Utara yang cenderung stabil meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2009 – 2013 sektor industri pengolahan Sulawesi Utara menyumbang sebesar 11 % dari total PDRB sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua.

Di tingkat provinsi, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang belum memberikan kontribusi cukup berarti dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Utara.

Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Utara cenderung menurun. Selama kurun waktu 2009 – 2013 sektor industri pengolahan menyumbangkan kontribusi sebesar 7,73 % dari total PDRB Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara (Milyar Rupiah)	Total PDRB Provinsi Sulawesi Utara (Milyar Rupiah)	Kontribusi (%)
2009	1.329,00	17.117,00	7,76
2010	1.459,00	18.343,00	7,95
2011	1.547,00	19.699,00	7,85
2012	1.626,00	21.242,00	7,65
2013	1.693,00	22.828,00	7,42

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 12 menunjukkan kontribusi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan di Wilayah Sulampua mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 0,76 % dari tahun 2012 yang berjumlah 561.855 jiwa menjadi 484.429 jiwa pada akhir tahun 2013.

Tabel 12. Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua Terhadap Jumlah Tenaga Kerja di Wilayah Sulampua

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja di Wilayah Sulampua (jiwa)	Kontribusi (%)
2009	504.198	9.506.701	5,30
2010	474.804	10.089.884	4,71
2011	569.316	10.535.820	5,40
2012	561.855	10.369.015	5,42
2013	484.429	10.388.177	4,66

Sumber : Diolah dari lampiran 6 & 7

Terhadap Wilayah Sulampua, kontribusi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua mengalami fluktuatif dengan kisaran 4,71 % – 5,42 % atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,10 % per tahunnya.

Tabel 13. Menggambarkan kontribusi tenaga kerja sektor industri pengolahan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua.

Tabel 13. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Wilayah Sulampua (jiwa)	Kontribusi (%)
2009	57.520	504.198	11,41
2010	50.621	474.804	10,66
2011	65.984	569.316	11,59
2012	57.886	561.855	10,30
2013	50.938	484.429	10,52

Sumber : Diolah dari lampiran 6

Selang tahun 2009 hingga tahun 2013 sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara tergolong rendah meskipun relatif stabil setiap tahunnya, dibandingkan dengan sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua.

Tabel 14. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara (jiwa)	Kontribusi (%)
2009	57.520	940.173	6,12
2010	50.621	936.939	5,40
2011	65.984	990.720	6,66
2012	57.886	957.292	6,05
2013	50.938	946.852	5,38

Sumber : Diolah dari lampiran 6 & 7

Tabel 14. Menggambarkan kontribusi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan di tingkat Provinsi.

Sepanjang tahun 2009 – 2013 tenaga kerja sektor industri pengolahan mengalami penurunan

sebesar 0,74 % dari tahun 2009 yang berjumlah 57.520 jiwa menjadi 50.938 jiwa pada tahun 2013.

Analisis Sektor Berdasarkan Wilayah Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Pada Sektor Industri Pengolahan Location Quotient PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Penggolongan sektor pada suatu wilayah ke dalam sektor basis dan non basis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), yang bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan sektor tersebut secara nasional.

Nilai *Location Quotient* (LQ) PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Nilai Location Quotient (LQ) PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Utara (Milyar Rupiah)	Total PDRB Sulawesi Utara (Milyar Rupiah)	PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulampua (Milyar Rupiah)	Total PDRB Sulampua (Milyar Rupiah)	LQ
2009	1.329,00	17.117,00	11.913,00	133.381,00	0,87
2010	1.459,00	18.343,00	12.821,00	141.668,00	0,88
2011	1.547,00	19.699,00	13.765,00	150.114,00	0,86
2012	1.626,00	21.242,00	14.701,00	161.390,00	0,84
2013	1.693,00	22.828,00	15.676,00	175.432,00	0,83

Sumber : Diolah dari lampiran 2, 3, & 4

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Location Quotient* (LQ) sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara lebih kecil dari 1 atau $LQ < 1$. Hal ini berarti dari segi pendapatan, sektor industri pengolahan Sulawesi Utara merupakan sektor non basis yang lebih rendah perbandingannya atau tingkat spesialisasinya dengan sektor industri pengolahan Wilayah Sulampua.

Location Quotient Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Pada tabel 16, Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Nilai *Location Quotient* tenaga kerja sektor industri pengolahan Sulawesi Utara berada di atas angka 1 atau $LQ > 1$. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor industri pengolahan Sulawesi Utara merupakan sektor basis yang lebih tinggi perbandingannya dengan sektor yang sama pada tingkat Wilayah Sulampua.

Tabel 16. Nilai Location Quotient (LQ) Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Utara (jiwa)	Total Tenaga Kerja di Sulawesi Utara (jiwa)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Sulampua (jiwa)	Total Tenaga Kerja di Sulampua (jiwa)	LQ
2009	57.520	940.173	504.198	9.506.701	1,15
2010	50.621	936.939	474.804	10.089.884	1,49
2011	65.984	990.720	569.316	10.535.820	1,23
2012	57.886	957.292	561.855	10.369.015	1,16
2013	50.938	946.852	484.429	10.388.177	1,15

Sumber : Diolah dari lampiran 2, 3, & 4

Analisis Multiplier Basis Ekonomi Sektor Industri Pengolahan

Analisis Multiplier PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Analisis *Multiplier* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sektor yang tergolong dalam sektor basis. Jadi, dalam hal ini sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara tidak dapat di analisis karena sesuai dengan konsep ekonomi basis bahwa sektor dengan nilai *Location Quotient* (LQ) yang kurang dari atau sama dengan satu ($LQ \leq 1$) bukan merupakan sektor basis atau tidak tergolong dalam sektor basis.

Analisis *Multiplier* Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Tinggi rendahnya peranan suatu sektor dalam suatu wilayah analisis dapat diketahui berdasarkan seberapa besar tenaga kerja yang diserap oleh sektor tersebut.

Tabel 17. Analisis *Multiplier* Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Basis (jiwa)	Jumlah tenaga Kerja Sektor Non Basis (jiwa)	Nilai <i>Multiplier</i> Tenaga Kerja (MS)
2009	57.520	882.653	16,35
2010	50.621	886.318	18,50
2011	65.984	924.736	15,01
2012	57.886	899.406	16,54
2013	50.938	895.914	18,59

Sumber : Diolah dari lampiran 6 & 7

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2009 nilai *Multiplier Shortrun* (MS) sama dengan 16,35. Nilai ini dapat diinterpretasikan jika kegiatan ekonomi sektor industri pengolahan meningkat Rp. 1000, maka tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan akan meningkat sebesar 16.350 jiwa. Angka 18,50 pada tahun 2010 menunjukkan terjadinya kenaikan tenaga kerja sebanyak 18.500 jiwa jika sektor industri pengolahan meningkat Rp. 1000. Nilai MS pada tahun 2011 mengalami penurunan, hal itu dapat dilihat dari nilai MS sebesar 15,01 jiwa yang berarti kegiatan sektor industri pengolahan meningkat RP.1000 menyebabkan kenaikan tenaga kerja sebanyak 15.010 jiwa. Pada tahun 2012 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,54, angka tersebut menggambarkan terjadinya kenaikan tenaga kerja sebanyak 16.540

jiwa. Jika kegiatan perekonomian sektor industri pengolahan meningkat Rp. 1000. Dan, angka 18,59 pada tahun 2013 memberikan gambaran terjadinya kenaikan tenaga kerja sebanyak 18.590 jiwa jika kegiatan sektor industri pengolahan meningkat Rp. 1000.

Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Elastisitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 18 menunjukkan elastisitas tenaga kerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 18. Elastisitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Utara (jiwa)	PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Utara (rupiah)	Elastisitas
2009	57.520	17.117,00	-
2010	50.621	18.343,00	-1,67
2011	65.984	19.699,00	4,10
2012	57.886	21.242,00	-1,57
2013	50.938	22.828,00	-1,61

Sumber : Diolah dari lampiran 6 & 7

Pada tahun 2010 elastisitas tenaga kerja sektor industri pengolahan Sulawesi Utara adalah -1,67. Ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 1,67 %, jika PDRB Sulawesi Utara naik sebesar 1 %. Pada tahun 2011 elastisitas tenaga kerja sektor industri pengolahan Sulawesi Utara mengalami kenaikan yaitu 4,10, nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 4,10 %, jika PDRB Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 1 %. Pada tahun 2012 dan 2013 elastisitas tenaga kerja sektor industri pengolahan Sulawesi

Utara mengalami penurunan kembali jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan Sulawesi Utara selang periode 2012 hingga 2013. Nilai elastisitas pada tahun 2012 menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 1,57 % pada setiap kenaikan PDRB sebesar 1 %. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2013, nilai elastisitas pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 1,61 % jika PDRB Sulawesi Utara naik sebesar 1 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara relatif stabil dari tahun ke tahun. Dari PDRB, sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara merupakan sektor non basis.
- 2) Peranan sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong kecil dan cenderung stabil setiap tahunnya. Dari aspek tenaga kerja, sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara merupakan sektor basis. *Multiplier* tenaga kerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Utara relatif stabil. Elastisitas tenaga kerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara cenderung menurun.

Saran

Peranan sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Utara di lihat dari aspek PDRB dan tenaga kerja masih tergolong rendah dibandingkan dengan Wilayah Sulampua. Dari hasil analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan PDRB sektor industri pengolahan tergolong dalam sektor non basis, untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk PDRB selain tenaga kerja, yang bisa meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, seperti bahan baku, teknologi, regulasi, sarana dan prasarana penunjang lainnya. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja ke tingkat yang lebih tinggi, perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap perkembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki peluang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja melalui investasi, perbaikan sarana dan prasarana penunjang lainnya, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, L., 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*. Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Assausari, S, 1999. *Manajemen Produksi II*. Fakultas Eonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.
- _____, 2010. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.
- _____, 2011. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.
- _____, 2012. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.
- _____, 2013. *Statistik Indonesia*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Konsep Industri Pengolahan*. BPS Sulut, Manado.
- Badan Pusat Statistik SULUT, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha*. BPS Sulut, Manado.
- _____, 2014. *Sulawesi Utara Dalam Angka*. BPS Sulut, Manado
- Barthos, B., 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Herlina , Azwar Harahap, dan Deny Setiawan., 2011. *Peran Sektor Industri Pengolahan Dalam Keterkaitannya Pada Perkonomian Daerah Kabupaten Siak*. Jurnal sosial ekonomi pembangunan, Tahun II No.4, November 2011.
- Jhingan, M.L., 2009. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Sahara dan Budi P. Resosudarmo., 1998. *Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Analisis Input-Output*. Direktorat Pengkajian Sistem Sosial, Ekonomi, dan Pengembangan Wilayah, BPP Teknologi.
- Saragih, B., 2001. *Suara dari Bogor*. Penerbit Yayasan USESE dan Sucofindo, Bogor.
- _____, 2010. *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Penerbit IPB Press, Bogor.
- Simanjuntak, Payaman, J., 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Penerbit : Baduose Media, Padang.
- Sukirno, S., 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Penerbit : Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suroto, 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Penerbit PT. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Tarigan, R., 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P., 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit : Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta.
- Tunggal, Hadi Setia, 2013. *Memahami Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Harvarindo. Jakarta.